

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor yang tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga memainkan peran krusial dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. UMKM berkontribusi lebih dari 60.5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 96.92% tenaga kerja nasional, terutama di daerah pedesaan dimana akses terhadap pekerjaan formal terbatas (IMF, 2024). Di antara berbagai subsektor UMKM, peternakan memiliki posisi strategis yang unik. Sektor ini tidak sekadar aktivitas ekonomi, melainkan merupakan sistem penghidupan yang mendukung mata pencaharian jutaan keluarga di pedesaan Indonesia (Abhishek. T *et al.*, 2021; Memon *et al.*, 2016). Namun, pengembangan sektor peternakan menghadapi kompleksitas tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan modal, akses teknologi, dan risiko produksi yang tinggi (Khanal dan Omobitan, 2020).

Kendala utama yang dihadapi peternak skala kecil adalah keterbatasan akses pembiayaan formal. Mayoritas peternak tradisional tidak memiliki agunan atau catatan keuangan yang memadai untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan konvensional. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk melakukan investasi, mengadopsi teknologi modern, dan mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan (Mulasih dan Noor, 2024). Namun, tantangan modal dan keterbatasan akses terhadap teknologi seringkali menjadi hambatan bagi petani kecil. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk subsidi, fasilitas kredit mikro, dan program pengembangan teknologi yang terjangkau bagi petani kecil (Rachmawati *et al.*, 2023). Penyediaan layanan kredit mikro tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berwirausaha, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* berupa peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga (Enimu *et al.*, 2017).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan dengan persyaratan lebih

longgar, bunga rendah, dan pendekatan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM, termasuk sektor peternakan. Program ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih longgar dibandingkan kredit perbankan tradisional, sehingga lebih mudah diakses oleh peternak skala kecil dan pengusaha pedesaan yang mungkin kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Alamsyah *et al.*, 2018). Dalam sektor peternakan, KUR telah menjadi instrumen kebijakan penting untuk mendukung peternak dalam berinvestasi pada praktik manajemen peternakan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan ternak, dan meningkatkan kapasitas produksi mereka (Murwadi *et al.*, 2020).

Namun, efektivitas program KUR sangat bergantung pada tingkat pengembalian kredit oleh peminjam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi program KUR di sektor peternakan adalah tingkat gagal bayar yang relatif tinggi. Sektor peternakan lebih berisiko dibandingkan sektor UMKM lainnya karena ketidakpastian hasil produksi. Peternak menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi harga pasar, wabah penyakit ternak, dan kondisi cuaca yang dapat secara langsung mempengaruhi produksi dan pendapatan mereka. Faktor-faktor ini meningkatkan kemungkinan gagal bayar, karena peternak mungkin kesulitan melunasi pinjaman jika pendapatan mereka terdampak oleh peristiwa yang tidak terduga tersebut (D. I. Sari, 2018).

Risiko di sektor peternakan mencakup berbagai dimensi yang signifikan. Sebagai contoh, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022 menyebabkan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 38,67 triliun (Firman *et al.*, 2022). Selain itu, kenaikan harga pakan terjadi akibat lonjakan harga jagung yang tidak terkendali, dipicu oleh kurangnya pasokan produksi domestik dan kebijakan larangan impor jagung. Kekurangan pasokan jagung ini tidak hanya memicu kenaikan harga pakan, tetapi juga meningkatkan harga *Day-Old Chick* (DOC), mendorong impor gandum, menurunkan produksi serta kualitas telur, dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga telur yang cukup tinggi (Ilham dan Saptana, 2019). Semua faktor ini berdampak pada kemampuan peternak dalam mengembalikan kredit yang telah mereka terima.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Khafifah *et al.*, (2022); Khoiriah *et al.*, (2024); Sujarweni & Utami, (2015) telah mengeksplorasi peran KUR dalam mendukung UMKM, namun penelitian yang secara khusus mengkaji perilaku

pengembalian kredit untuk UMKM sektor peternakan masih terbatas. Sektor UMKM sangat bervariasi dalam hal risiko yang dihadapi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Wulandari (2019) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit, termasuk karakteristik peminjam seperti usia, pendidikan, dan pengalaman usaha. Namun, faktor-faktor ini mungkin bermanifestasi secara berbeda di sektor peternakan. Makandolu dan Sogen (2015) menambahkan bahwa faktor seperti plafon kredit, setoran pokok, setoran bunga, setoran tunggakan, dan waktu pelunasan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas kredit.

Pengelolaan KUR pada sektor peternakan sering kali menghadapi masalah terkait risiko kredit bermasalah, seperti penunggakan atau kemacetan angsuran. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas aset lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembalian KUR di sektor peternakan. Penelitian ini akan secara khusus mendalami dinamika pengembalian KUR sektor peternakan dengan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Karakteristik peternak, usaha dan kredit penerima Kredit Usaha Rakyat.
2. Hubungan antara kolektibilitas dan karakteristik peternak, usaha, dan kredit penerima Kredit Usaha Rakyat.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembalian Kredit Usaha Rakyat pada usaha peternakan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pengembangan sektor peternakan, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha peternakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk



penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit dan pengembangan usaha peternakan di Indonesia.